

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
KOMISI II DPR RI**

(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2011-2012 |
| Masa Persidangan | : IV |
| Rapat Ke | : -- |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/Tanggal | : Rabu, 27 Juni 2012 |
| Waktu | : 14.00 WIB - Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat KK I Gd. Nusantara |
| Acara | : Audiensi/Konsultasi terkait Pemekaran. |
| Ketua Rapat | : Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI |
| Hadir | : 9 Anggota Komisi II DPR RI |
| Hadir Tamu | : Asisten I Pemerintah Provinsi Papua beserta jajarannya, Pejabat Bupati Jayapura DPRD Kab. Jayapura, dan Tokoh Masyarakat Kab. Jayapura. |

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 dibuka pukul 14.00 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Asisten I Prov. Papua beserta jajarannya, Pejabat Bupati Jayapura DPRD Kab. Jayapura, dan Tokoh Masyarakat Kab. Jayapura pada hari ini yakni untuk Konsultasi terkait Pembentukan Daerah Otonom Baru calon Kabupaten Grime Nawa Provinsi.
3. Assisten I bidang Pemerintahan Provinsi Papua mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Papua menyampaikan bahwa:
 - a. Grime Nawa merupakan salah satu daerah pemekaran di Papua yang harus **diprioritaskan**, karena Grime nawa merupakan daerah perbatasan dengan Papua New Guinea. Proses pembentukan Kabupaten Grime Nawa telah disetujui oleh kabupaten induk pada tanggal 19 November 2008. Pembentukan calon Kabupaten Grime Nawa ini terdiri dari 12 distrik dan 89 kampung. Secara etnik dan budaya merupakan sebuah kesatuan sosial budaya.
 - b. Tim Pembentukan Calon Kabupaten Grimenawa (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Jayapura dan DPRD Kabupaten Jayapura) juga telah mengunjungi DPD RI asal papua untuk merekomendasikan agar Grime Nawa segera dapat dimekarkan. Setelah Komisi II DPR RI, Tim akan berkunjung ke Kemendagri mengharapakan Pemerintah agar memprioritaskan pemekaran Kabupaten Grime Nawa.

- c. Tim yang datang ke Komisi II DPR RI ini, baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif, telah mempunyai dokumen terbaru draft final laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Grime Nawa dan laporan akhir kajian pembentukan ibu kota Kabupaten Grime Nawa, serta kelengkapan daripada "*Persetujuan Pelepasan Aset Provinsi (Sarana prasarana untuk perkantoran dan pelayanan publik di wilayah DOB)*".
 - d. Assisten bidang Pemerintahan Provinsi Papua juga menyampaikan penegasan kepada tim pemekaran Grime Nawa agar pemekaran tersebut dipergunakan untuk kepentingan Rakyat, hal tersebut disebabkan karena terdapat tim yang dengan sengaja menggunakan dokumen pemekaran untuk menggarap para kontraktor atau dunia usaha dengan janji-janji yang tidak bertanggungjawab yang dapat menghambat kelancaran pembentukan calon kabupaten Grimenawa.
4. Ketua Rapat menyampaikan bahwa saat ini terdapat 19 calon daerah otonom baru yang sudah melengkapi persyaratannya dan Komisi II DPR RI telah menyampaikan surat kepada Presiden RI dengan Nomor Surat LG.01.01/04093/DPRRI/IV/2012 pada tanggal 17 April 2012 dan telah mendapat jawaban dari Presiden RI dengan Nomor Surat R-46/Pres/05/2012 pada tanggal 11 Mei 2012 yang intinya menugaskan Mendagri, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden membahas ke 19 Rancangan Undang-Undang tersebut.

II. KESIMPULAN

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan bahwa

1. Komisi II DPR RI mengapresiasi masukan/aspirasi yang disampaikan Asisten I Pemerintah Provinsi Papua beserta jajarannya, Pejabat Bupati Jayapura DPRD Kab. Jayapura, dan Tokoh Masyarakat Kab. Jayapura, serta mengingatkan agar senantiasa mengikuti Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dalam proses Pembentukan Kabupaten Daerah Otonom Baru tersebut. Komisi II DPR RI juga menyampaikan bahwa tujuan utama Pembentukan daerah otonom baru yakni untuk kesejahteraan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah rentang kendali.
2. Terkait dengan aspirasi masyarakat Jayapura yang hendak membentuk calon daerah otonom baru yaitu calon Kabupaten Grime Nawa, maka bila memang dokumen pemekarannya sudah lengkap, Komisi II DPR RI akan menyampaikan kepada Mendagri agar setelah pembahasan 19 calon DOB selesai, maka aspirasi pembentukan Kabupaten Grimenawa tersebut dapat disampaikan kepada Presiden.

3. Terkait laporan adanya tim yang sengaja menggunakan dokumen pemekaran untuk menggarap para kontraktor atau dunia usaha dengan janji-janji yang tidak bertanggungjawab maupun terjadi suap atau ada permintaan-permintaan biaya-biaya yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dari oknum manapun, agar dapat dilaporkan kepada Pimpinan Komisi II DPR RI khususnya dilaporkan ke Ketua Panja Otonomi Daerah (Ganjar Pranowo) mengingat hal tersebut dapat mencoreng nama baik Komisi II DPR RI maupun para Tim Pembentukan Daerah Otonom Baru dari Calon Kabupaten Grime Nawa.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 15.00 WIB.

KETUA RAPAT,

GANJAR PRANOWO
A-365